



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 16
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 24 JUNI 2019
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP Tahun 2020 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2020) Kementerian Agama RI
Ketua Rapat	: DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 30 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Menteri Agama RI Beserta Jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc dan H. Marwan Dasopang, M.Si, dan H. Iskan Qolba Lubis, M.A. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dengan agenda membahas “**Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama RI Tahun 2020**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu indikatif Kementerian Agama RI dalam RAPBN Tahun 2020 sebesar Rp65.245.833.430.000,- (*enam puluh lima triliun dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*), yang akan dialokasikan untuk program:

No	Program	Pagu Indikatif 2020 (dalam ribuan rupiah)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.921.417.232
2	Kerukunan Umat Beragama	52.321.037
3	Pengawasan Akuntabilitas	162.396.272
4	Bimas Islam	5.310.238.736
5	Pendidikan Islam	52.410.371.101
6	Bimas Kristen	1.713.397.340
7	Bimas Katolik	859.770.735
8	Bimas Hindu	746.637.881
9	Bimas Buddha	255.149.529
10	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.212.866.308
11	Litbang dan Diklat	560.978.718
12	Jaminan Produk Halal	40.288.541
JUMLAH		65.245.833.430

2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan atas usulan tambahan anggaran Kementerian Agama RI sebesar Rp6.105.319.413.000,- (*enam triliun seratus lima miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020 bersama Pejabat Eselon I Kementerian Agama RI.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk secara sungguh-sungguh menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mempertahankan capaian kinerja Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - b. Mempercepat proses pengisian jabatan definitif Kepala UPT Asrama Haji Makassar dan UPT Asrama Haji Medan dengan memperhatikan prinsip transparan, profesional, dan berintegritas untuk meningkatkan pelayanan terhadap calon jemaah haji.

- c. Melakukan perbaikan terhadap berbagai regulasi tentang pengisian jabatan yang berpotensi munculnya kasus-kasus transaksional di lingkungan Kementerian Agama RI.
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di lingkungan Kementerian Agama RI melalui rekrutmen dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.
 - e. Meningkatkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat melalui sosialisasi dan sertifikasi yang lebih masif.
 - f. Merancang program terobosan untuk peningkatan efektivitas program Kerukunan Umat Beragama.
 - g. Meningkatkan sosialisasi program-program tentang moderasi dalam beragama.
 - h. Menyampaikan data yang lebih lengkap kepada Komisi VIII DPR RI tentang sebaran alokasi anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), data capaian dan kebutuhan pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi ruang kelas satuan pendidikan.
 - i. Meningkatkan anggaran untuk program Penyelenggaraan Haji dan Umrah akibat adanya penambahan kuota calon jemaah haji.
 - j. Menyampaikan data rencana alokasi anggaran untuk Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) kepada Komisi VIII DPR RI untuk dijadikan acuan dalam pembahasan anggaran Pendidikan Islam.
 - k. Memperhatikan dan memprioritaskan realisasi serapan anggaran atas program-program Kementerian Agama RI berdasarkan aspirasi daerah.
 - l. Mengalokasikan anggaran untuk pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Merauke Papua.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk segera mengevaluasi PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dengan terlebih dahulu meminta masukan, saran, dan rekomendasi dari seluruh *stakeholders* dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak rapat kerja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



DR. H.M. ALI TAHER, SH, M.HUM.